



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 5434-5441

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi di Indonesia

Marsya Hasdiani Putri, Hendra Riofita

Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

asyamarsya07@gmail.com, hendrariofita@yahoo.com

Abstrak

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi makro yang ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional apabila tidak dikendalikan dengan baik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran kebijakan moneter dalam menjaga kestabilan inflasi sebagai upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi di Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif melalui analisis berbagai jurnal, buku, artikel ilmiah, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan moneter dan inflasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter melalui instrumen suku bunga, operasi pasar terbuka, dan giro wajib minimum memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi dengan cara mengatur jumlah uang beredar, menekan konsumsi berlebihan, serta menjaga stabilitas harga. Efektivitas kebijakan tersebut dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi masyarakat, kondisi ekonomi global, stabilitas politik, serta kualitas komunikasi kebijakan Bank Indonesia. Kesimpulannya, kebijakan moneter memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah sangat diperlukan agar pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data statistik yang lebih luas sehingga hubungan antarvariabel dapat dianalisis secara empiris, mendalam dan lebih akurat.

Kata kunci: Inflasi; Moneter; Bank; Stabilitas; Indonesia

1. Latar Belakang

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang berkaitan dengan menurunnya nilai uang yang berdampak pada meningkatnya harga barang dan jasa secara umum. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi stabilitas harga, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam perekonomian, seperti terganggunya fungsi keuangan, terjadinya distorsi harga dan output, serta menurunnya efisiensi dan investasi produktif. Selain itu, inflasi juga dapat memicu ketidakpuasan sosial karena menurunnya daya beli masyarakat. Secara umum, inflasi terjadi akibat adanya peningkatan permintaan barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan ketersediaan barang, sehingga mendorong kenaikan harga secara terus-menerus. Dalam kondisi tertentu, inflasi yang tidak terkendali bahkan dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pengangguran, serta melemahnya nilai mata uang suatu negara (Zega et al., 2022). Jika perekonomian melemah, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga. Inflasi yang tinggi dan tidak stabil menunjukkan kondisi ekonomi yang kurang baik karena menyebabkan harga barang dan jasa terus meningkat, sehingga menurunkan daya beli masyarakat dan dapat meningkatkan kemiskinan di Indonesia (Salim et al., 2021).

Salah satu penyebab umum inflasi adalah permintaan yang melebihi pasokan barang dan jasa. Ketika banyak orang bersedia membayar lebih untuk mendapatkan produk atau layanan tertentu, produsen cenderung menaikkan harga untuk mengoptimalkan keuntungan mereka. Namun, jika pasokan tidak dapat memenuhi permintaan yang tinggi, ini dapat menyebabkan kenaikan harga secara umum. Inflasi juga dapat dipicu oleh biaya produksi yang meningkat, seperti kenaikan upah atau harga bahan baku. Jika perusahaan harus membayar lebih untuk produksi, mereka mungkin akan meneruskan biaya tersebut kepada konsumen melalui peningkatan harga. Selain itu, inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti perubahan dalam harga minyak, fluktuasi nilai tukar

mata uang, atau ketidakstabilan politik dalam suatu negara. Peristiwa global seperti krisis ekonomi atau perang dapat memiliki dampak signifikan terhadap tingkat inflasi di berbagai negara (Riska et al., 2025).

Inflasi memiliki pengaruh terhadap daya beli masyarakat karena kenaikan harga barang dan jasa secara umum dapat menurunkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika tingkat inflasi meningkat, harga kebutuhan pokok seperti makanan, energi, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari lainnya cenderung mengalami kenaikan, sehingga memberikan tekanan yang cukup besar terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Kondisi ini menyebabkan nilai uang yang dimiliki masyarakat menjadi berkurang, sehingga jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan pendapatan yang sama menjadi lebih sedikit. Selain itu, jika kenaikan harga tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan yang seimbang, maka daya beli masyarakat akan semakin melemah dan berdampak pada perubahan pola konsumsi, di mana masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya serta memilih barang yang lebih terjangkau. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat karena kemampuan untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder menjadi terbatas. Inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan masyarakat mengurangi tabungan dan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari akibat meningkatnya biaya hidup. Di sisi lain, menurunnya daya beli masyarakat dapat berdampak pada melemahnya aktivitas ekonomi karena tingkat konsumsi rumah tangga ikut menurun. Oleh karena itu, pengendalian inflasi menjadi hal yang sangat penting agar stabilitas harga tetap terjaga, daya beli masyarakat tidak terus menurun, dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat berjalan secara stabil serta berkelanjutan.

Perubahan tingkat inflasi juga berdampak pada dinamika ekonomi secara keseluruhan, di mana variabel-variabel ekonomi makro seperti suku bunga, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi turut memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Pengendalian inflasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan bank Indonesia dalam mengatur jumlah uang yang beredar dan kondisi likuiditas. Saat inflasi meningkat, kebijakan cenderung diperketat untuk menahan peredaran uang, sedangkan saat ekonomi melambat kebijakan justru dilonggarkan untuk menjaga pertumbuhan (Firmansyah & Mu'ammal, 2023). Dalam kondisi inflasi yang tinggi, ketidakstabilan ekonomi dapat terjadi dan memperburuk kesejahteraan masyarakat apabila tidak segera dikendalikan. Oleh karena itu, stabilitas harga menjadi hal yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Stabilitas harga yang terjaga dapat menciptakan kondisi ekonomi yang lebih sehat, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berbelanja dan berinvestasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dengan demikian, pengendalian inflasi melalui berbagai kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan moneter, menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Patty, 2026).

Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah melalui Bank Indonesia memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi dengan menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan ini dilakukan melalui berbagai instrumen yang bertujuan untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas harga di masyarakat. Salah satu instrumen yang sering digunakan adalah operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan jual beli surat berharga pemerintah oleh bank sentral untuk memengaruhi likuiditas di pasar. Selain itu, Bank Indonesia juga mengatur suku bunga acuan yang dapat memengaruhi tingkat kredit, konsumsi, serta investasi masyarakat, di mana kenaikan suku bunga dapat menekan inflasi dengan mengurangi permintaan kredit. Instrumen lainnya adalah giro wajib minimum, yaitu ketentuan cadangan dana yang harus disimpan bank umum di bank sentral, yang dapat memperketat atau melonggarkan penyaluran kredit sesuai kondisi ekonomi. Tidak hanya itu, kebijakan moneter juga dapat bersifat kualitatif melalui pendekatan moral suasion, yaitu imbauan atau arahan dari bank sentral kepada perbankan agar bertindak sesuai tujuan kebijakan ekonomi. Dengan berbagai instrumen tersebut, Bank Indonesia berupaya mengendalikan inflasi agar tetap stabil sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat di Indonesia (Syahrul et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi makro yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat sehingga diperlukan peran aktif pemerintah melalui Bank Indonesia dalam mengendalikannya melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter tersebut dilakukan dengan berbagai instrumen seperti operasi pasar terbuka, pengaturan suku bunga acuan, giro wajib minimum, serta kebijakan kualitatif untuk menjaga stabilitas harga dan jumlah uang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi di Indonesia, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi di Indonesia agar pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur yang berfokus pada pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan topik yang dikaji. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena ekonomi makro, khususnya yang berkaitan dengan ekspor, impor, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui metode studi literatur, peneliti dapat mengkaji berbagai teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan sistematis mengenai hubungan antarvariabel yang diteliti. Sumber data yang digunakan meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku ekonomi, e-book, artikel ilmiah, laporan resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif agar data yang digunakan memiliki tingkat relevansi, validitas, dan kredibilitas yang baik sesuai dengan fokus penelitian.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan cara menelusuri berbagai sumber terpercaya, membaca secara mendalam, memahami isi bacaan, serta mencatat informasi penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah itu, data diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan tema tertentu agar memudahkan proses analisis. Dalam penelitian ini, peneliti juga membandingkan berbagai pendapat dan hasil penelitian sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih objektif mengenai fenomena yang dibahas. Teknik dokumentasi dipilih karena mampu memberikan informasi yang luas serta mendukung pengkajian data secara sistematis tanpa harus melakukan penelitian lapangan secara langsung.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara induktif. Pada tahap reduksi data, informasi yang relevan dipilih dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, sedangkan pada tahap penyajian data, informasi disusun secara sistematis agar hubungan antar konsep dapat dipahami dengan lebih mudah. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur yang kredibel dan memiliki keterkaitan dengan penelitian. Metode ini dipilih karena mampu memberikan penjelasan yang lebih mendalam, sistematis, serta komprehensif dalam memahami dinamika ekonomi makro yang kompleks dan terus berkembang.

3. Hasil dan Diskusi

a. Peran Kebijakan Moneter dalam Mengendalikan Inflasi

Inflasi merupakan kondisi ketika harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang terus-menerus, sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan melemahnya nilai uang. Dalam situasi seperti ini, kestabilan ekonomi dapat terganggu apabila inflasi tidak dikendalikan dengan baik karena kenaikan harga yang tidak terkendali dapat memengaruhi tingkat konsumsi, investasi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kegiatan ekonomi dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dan tingkat harga di masyarakat. Salah satu kebijakan yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia. Kebijakan moneter dilakukan melalui berbagai instrumen seperti pengaturan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan giro wajib minimum untuk mengendalikan jumlah uang beredar serta menjaga stabilitas nilai rupiah. Dengan adanya kebijakan moneter yang tepat dan efektif, diharapkan tingkat inflasi dapat dikendalikan sehingga stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga dan aktivitas perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Sejalan dengan upaya pengendalian inflasi tersebut, dalam pelaksanaannya Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebagai salah satu instrumen utama untuk mengontrol inflasi. Ketika inflasi meningkat, kenaikan suku bunga dilakukan agar masyarakat lebih memilih menyimpan uang di bank dibandingkan melakukan pinjaman atau konsumsi. Hal ini menyebabkan jumlah uang yang beredar di masyarakat menjadi berkurang sehingga tekanan terhadap kenaikan harga dapat ditekan. Selain itu, kenaikan suku bunga juga membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga pelaku usaha dan masyarakat cenderung mengurangi aktivitas kredit dan pengeluaran. Dampak lanjutan dari kebijakan ini juga terlihat pada menurunnya permintaan kredit di sektor perbankan yang akhirnya dapat membantu menekan laju inflasi. Selain itu, pengendalian suku bunga juga berkaitan dengan stabilitas nilai tukar rupiah, karena suku bunga yang lebih tinggi dapat menarik aliran modal masuk dari luar negeri sehingga memperkuat nilai mata uang. Dengan demikian, kebijakan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia

menjadi langkah penting dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas harga, serta mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan (Sitorus et al., 2024).

Selain kebijakan suku bunga tersebut, dalam pelaksanaan kebijakan moneter instrumen lain juga memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi melalui pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank sentral menggunakan beberapa alat utama seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan kas minimum untuk menjaga stabilitas harga dan keseimbangan perekonomian. Ketika inflasi meningkat, kebijakan moneter biasanya diperketat dengan tujuan mengurangi peredaran uang agar tekanan terhadap kenaikan harga dapat ditekan. Salah satu instrumen yang paling sering digunakan adalah suku bunga, di mana kenaikan suku bunga dapat menekan konsumsi dan investasi karena masyarakat maupun pelaku usaha cenderung mengurangi pinjaman akibat biaya kredit yang lebih tinggi. Dengan berkurangnya aktivitas konsumsi dan investasi, permintaan barang dan jasa dapat menurun sehingga laju inflasi lebih mudah dikendalikan. Selain itu, pengaturan cadangan kas minimum juga berperan dalam membatasi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat lebih terkendali karena bank wajib menyimpan sebagian dana sebagai cadangan di bank sentral. Di samping itu, operasi pasar terbuka juga menjadi instrumen penting melalui penjualan atau pembelian surat berharga oleh bank sentral untuk mengatur likuiditas di pasar. Dengan penggunaan berbagai instrumen tersebut secara tepat dan terkoordinasi, kebijakan moneter dapat membantu menjaga stabilitas harga serta mendukung kondisi ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Selain instrumen tersebut, operasi pasar terbuka (OPT) merupakan alat yang sangat penting dan paling sering digunakan oleh Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi. OPT dilakukan dengan cara menjual atau membeli surat berharga pemerintah di pasar keuangan untuk mengatur likuiditas perbankan. Ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia akan menjual surat berharga sehingga uang yang beredar di masyarakat berkurang karena dana masyarakat dan bank terserap untuk pembelian surat berharga tersebut. Kondisi ini menyebabkan cadangan bank menurun dan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit juga ikut berkurang, sehingga konsumsi dan investasi masyarakat dapat ditekan. Sebaliknya, jika perekonomian melambat, Bank Indonesia dapat membeli kembali surat berharga untuk menambah likuiditas dan mendorong aktivitas ekonomi. Dengan mekanisme ini, operasi pasar terbuka menjadi instrumen utama yang efektif dalam mengatur jumlah uang beredar sehingga inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas harga tetap terjaga (Mujiadi et al., 2025).

Selanjutnya, dalam mendukung efektivitas pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter, Giro Wajib Minimum (GWM) juga menjadi salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol likuiditas perbankan dan mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. GWM adalah kewajiban bagi bank umum untuk menyimpan sebagian dana pihak ketiga di bank sentral dalam bentuk saldo minimum tertentu. Ketika inflasi meningkat, Bank Indonesia dapat menaikkan rasio GWM sehingga dana yang dapat disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit menjadi lebih terbatas. Kondisi ini menyebabkan penyaluran kredit menurun, sehingga konsumsi dan investasi masyarakat ikut berkurang dan tekanan inflasi dapat ditekan. Sebaliknya, ketika perekonomian melambat, GWM dapat diturunkan untuk meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit sehingga aktivitas ekonomi kembali meningkat. Dengan demikian, kebijakan GWM menjadi salah satu alat penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sekaligus mengontrol inflasi di Indonesia (Sari et al., 2023).

Berdasarkan penggunaan berbagai instrumen tersebut, dalam kondisi tertentu seperti saat inflasi mengalami kenaikan akibat meningkatnya harga barang dan jasa, terutama pada sektor energi dan pangan, Bank Indonesia akan mengambil langkah kebijakan moneter yang lebih ketat. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, memperketat penyaluran kredit melalui giro wajib minimum, serta mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan utama dari langkah tersebut adalah untuk menekan permintaan agregat agar tidak terlalu tinggi sehingga kenaikan harga dapat dikendalikan. Dengan demikian, jika inflasi berada pada tingkat yang tinggi, kebijakan moneter diperketat agar harga tetap stabil dan perekonomian tidak mengalami ketidakseimbangan yang dapat merugikan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi sangat bergantung pada ketepatan kebijakan moneter dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga.

Secara keseluruhan, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian inflasi, pengaturan suku bunga, serta pengelolaan jumlah uang beredar di masyarakat. Melalui instrumen suku bunga, bank sentral dapat menekan laju inflasi dengan mengurangi permintaan uang ketika suku bunga dinaikkan, dan sebaliknya mendorong pertumbuhan ekonomi ketika suku bunga diturunkan. Selain itu, kebijakan ini juga membantu menjaga keseimbangan siklus ekonomi, mengurangi risiko gejolak ekonomi yang berlebihan, serta mengatasi permasalahan likuiditas di pasar keuangan melalui operasi pasar terbuka dan intervensi langsung. Dengan berbagai mekanisme tersebut, kebijakan moneter memberikan kontribusi besar dalam

menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil, terkendali, dan berkelanjutan sehingga kebijakan ini membantu menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia (Azky et al., 2024).

Sesuai dengan penelitian (Riofita, 2024) terlihat bahwa efektivitas suatu kebijakan atau sistem sangat dipengaruhi oleh persepsi risiko dan peluang yang dirasakan oleh masyarakat dalam mengambil keputusan ekonomi. Sama halnya dengan kebijakan moneter, di mana instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan GWM memengaruhi perilaku konsumsi, investasi, serta jumlah uang beredar, maka dalam konteks Fintech Syariah, persepsi risiko yang rendah dan peluang yang tinggi mendorong masyarakat untuk lebih menerima dan merekomendasikan penggunaan layanan tersebut. Dengan demikian, baik kebijakan moneter maupun inovasi keuangan digital sama-sama berperan dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat guna mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Selain itu, peran kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi di Indonesia tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang. Hal ini terlihat dari bagaimana Bank Indonesia secara konsisten menyesuaikan berbagai instrumen kebijakan moneter sesuai dengan kondisi perekonomian yang terjadi, baik saat inflasi meningkat maupun saat terjadi perlambatan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan moneter berfungsi sebagai alat utama untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang di masyarakat, sehingga gejolak harga dapat diminimalisir. Selain itu, koordinasi antara kebijakan suku bunga, operasi pasar terbuka, dan GWM menunjukkan bahwa setiap instrumen memiliki keterkaitan dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih menyeluruh. Dengan demikian, semakin efektif implementasi kebijakan moneter, maka semakin kuat pula perannya dalam menjaga inflasi tetap terkendali serta mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia.

b. Faktor Yang Mendorong Efektivitas Kebijakan Moneter

Efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi tidak hanya ditentukan oleh instrumen yang digunakan oleh bank sentral, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam perekonomian, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam praktiknya, kebijakan moneter dapat berjalan optimal apabila didukung oleh kondisi ekonomi yang stabil serta perilaku masyarakat yang rasional terhadap perubahan kebijakan (Ningsih & Tanjung, 2025). Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kebijakan bank sentral juga menjadi faktor penting karena kepercayaan yang tinggi dapat membantu menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali. Kebijakan moneter juga akan lebih efektif apabila didukung oleh kondisi sektor riil yang baik, seperti kelancaran produksi dan distribusi barang, sehingga kenaikan harga dapat ditekan. Di sisi lain, pengaruh faktor eksternal seperti perubahan harga minyak dunia, nilai tukar mata uang, dan kondisi ekonomi global sering kali menjadi tantangan dalam pengendalian inflasi karena dapat memicu kenaikan harga secara tidak langsung. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi yang baik antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta kebijakan pemerintah di berbagai sektor agar stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi dapat tercapai secara maksimal.

Ekspektasi inflasi masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang sangat memengaruhi efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi. Ketika masyarakat memperkirakan bahwa harga barang dan jasa akan terus meningkat di masa depan, mereka cenderung melakukan pembelian lebih awal dan meningkatkan konsumsi saat ini. Perilaku ini justru dapat mendorong permintaan agregat meningkat sehingga tekanan inflasi semakin besar, meskipun bank sentral telah melakukan pengetatan kebijakan moneter. Sebaliknya, jika ekspektasi inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan yang kredibel dan konsisten, maka perilaku ekonomi masyarakat akan lebih stabil sehingga kebijakan moneter menjadi lebih efektif dalam menekan laju inflasi. Oleh karena itu, kredibilitas Bank Indonesia dalam menyampaikan arah kebijakan juga menjadi bagian penting dalam membentuk ekspektasi masyarakat yang lebih rasional (Anggraini et al., 2025).

Selanjutnya, stabilitas politik juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan kebijakan moneter. Kondisi politik yang stabil akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, pelaku usaha, dan investor terhadap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah maupun bank sentral. Kepercayaan ini membuat transmisi kebijakan moneter, seperti perubahan suku bunga atau pengendalian likuiditas, dapat berjalan lebih efektif dalam memengaruhi aktivitas ekonomi. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dapat menimbulkan ketidakpastian ekonomi, melemahkan kepercayaan pasar, serta mengurangi efektivitas kebijakan moneter karena masyarakat dan investor cenderung bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan ekonomi. Dalam jangka panjang, stabilitas politik juga berperan dalam menjaga konsistensi arah kebijakan ekonomi sehingga inflasi lebih mudah dikendalikan.

Selain itu, volatilitas global juga turut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi. Perubahan harga komoditas internasional, terutama energi dan pangan, serta fluktuasi nilai tukar mata uang dapat menimbulkan tekanan inflasi dari luar negeri yang sulit dikendalikan hanya dengan kebijakan domestik. Ketika harga minyak dunia meningkat atau nilai tukar rupiah melemah, biaya produksi dalam negeri ikut naik sehingga harga barang dan jasa juga terdorong naik. Kondisi ini membuat kebijakan moneter harus bekerja lebih keras untuk menjaga stabilitas harga, sehingga efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global yang terjadi. Selain itu, ketidakpastian ekonomi global juga dapat memengaruhi arus modal masuk dan keluar yang berdampak pada stabilitas keuangan domestik (Mujiadi et al., 2025).

Dalam penelitian (Riofita, 2022) efektivitas suatu sistem sangat dipengaruhi oleh pemberdayaan jaringan dan penyebaran informasi yang baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan instrumen yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana informasi mengenai kebijakan tersebut dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ekonomi makro, efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi juga tidak hanya bergantung pada instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan giro wajib minimum (GWM), tetapi juga pada kredibilitas serta kualitas penyebaran informasi kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral. Ketika Bank Indonesia mampu menyampaikan kebijakan secara jelas, transparan, dan konsisten, masyarakat serta pelaku usaha akan lebih mudah memahami arah kebijakan ekonomi yang diterapkan. Kondisi tersebut dapat membantu membentuk ekspektasi inflasi yang lebih stabil sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan ekonomi yang berlebihan, seperti penimbunan barang atau kenaikan harga secara tidak wajar. Selain itu, komunikasi kebijakan yang baik juga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, semakin baik informasi dan komunikasi kebijakan disampaikan kepada masyarakat, maka semakin efektif pula pengendalian inflasi karena kebijakan yang diterapkan dapat didukung oleh respons masyarakat yang lebih rasional dan sesuai dengan tujuan kebijakan moneter.

Implikasi Kebijakan Moneter terhadap Pengendalian Inflasi

Dari hasil analisis, terlihat bahwa kebijakan moneter memiliki implikasi penting dalam mengendalikan inflasi di Indonesia yang menunjukkan bahwa Bank Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas harga melalui pengendalian jumlah uang beredar. Penggunaan instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan giro wajib minimum terbukti mampu menekan inflasi dengan cara mengurangi tekanan permintaan di masyarakat serta mengendalikan likuiditas perbankan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter bukan hanya berfungsi sebagai alat teknis, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Ketika inflasi dapat dikendalikan dengan baik, daya beli masyarakat lebih terjaga dan kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih stabil. Oleh karena itu, implementasi kebijakan moneter yang tepat waktu, konsisten, dan sesuai dengan kondisi ekonomi menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Azky et al., 2024).

Selanjutnya, implikasi lainnya menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada sinergi antar instrumen serta respons cepat Bank Indonesia terhadap perubahan kondisi ekonomi, baik ketika inflasi meningkat maupun saat terjadi perlambatan ekonomi. Dalam situasi inflasi tinggi, pengetatan kebijakan melalui kenaikan suku bunga, pengurangan likuiditas melalui operasi pasar terbuka, serta pengaturan GWM menjadi langkah penting untuk menstabilkan harga, meskipun dalam jangka pendek dapat menekan konsumsi dan investasi masyarakat. Namun demikian, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya inflasi yang lebih tinggi yang dapat merugikan perekonomian secara luas. Selain itu, penelitian ini juga mengimplikasikan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak hanya ditentukan oleh kebijakan moneter semata, tetapi juga membutuhkan dukungan stabilitas sektor keuangan dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan Bank Indonesia. Dengan demikian, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dan berkelanjutan dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang sehat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang (Lesmana et al., 2025).

Selain itu, implikasi kebijakan moneter juga terlihat dari pengaruhnya terhadap stabilitas sektor keuangan dan keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter yang efektif dapat menciptakan kondisi ekonomi yang lebih stabil sehingga pelaku usaha memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam melakukan investasi dan pengembangan usaha. Stabilitas inflasi yang terjaga juga membantu masyarakat dalam merencanakan pengeluaran dan aktivitas ekonomi secara lebih baik karena harga barang dan jasa cenderung lebih terkendali. Di sisi lain, apabila inflasi tidak dapat dikendalikan, maka dapat muncul ketidakpastian ekonomi yang berpotensi menurunkan minat investasi, melemahkan daya beli masyarakat, dan menghambat pertumbuhan

ekonomi nasional. Oleh karena itu, kebijakan moneter tidak hanya berdampak pada pengendalian harga semata, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap stabilitas sistem keuangan, peningkatan kepercayaan pasar, serta keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi melalui kebijakan yang adaptif, responsif, dan sesuai dengan dinamika perekonomian yang terus berkembang.

Sejalan dengan penelitian (Riofita, 2024) pentingnya inovasi, komunikasi, dan keterlibatan dalam mendukung tercapainya tujuan kebijakan menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem tidak hanya bergantung pada instrumen yang digunakan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Sama seperti inovasi layanan, kepemimpinan, dan keterlibatan karyawan yang mampu memperkuat citra kompetitif lembaga pendidikan, efektivitas kebijakan moneter juga sangat dipengaruhi oleh sinergi antar instrumen, ketepatan respons dalam menghadapi perubahan ekonomi, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan Bank Indonesia. Komunikasi yang jelas dan transparan dari bank sentral dapat membantu masyarakat memahami tujuan kebijakan sehingga mampu membentuk ekspektasi inflasi yang lebih stabil. Selain itu, kemampuan pemerintah dan bank sentral dalam beradaptasi terhadap dinamika ekonomi global maupun domestik juga menjadi faktor penting agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif. Dengan demikian, baik kebijakan moneter maupun inovasi layanan sama-sama menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh alat atau instrumen yang digunakan, tetapi juga oleh peran aktor, kualitas komunikasi, kerja sama, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan untuk mencapai hasil yang optimal.

4. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dan efektif dalam mengendalikan inflasi di Indonesia melalui berbagai instrumen utama seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan giro wajib minimum yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas harga. Hasil analisis menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga mampu menekan inflasi dengan mengurangi konsumsi dan investasi masyarakat, sementara operasi pasar terbuka dan GWM berfungsi mengendalikan likuiditas perbankan sehingga tekanan inflasi dapat diminimalisir. Efektivitas kebijakan moneter juga dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi masyarakat, stabilitas politik, serta kondisi ekonomi global yang dapat memperkuat atau melemahkan transmisi kebijakan. Selain itu, kebijakan moneter terbukti tidak hanya berdampak jangka pendek tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi jangka panjang melalui pengendalian daya beli dan stabilitas nilai mata uang. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antar instrumen kebijakan moneter serta respons cepat Bank Indonesia sangat diperlukan dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi agar inflasi tetap terkendali. Selain itu, diperlukan peningkatan komunikasi kebijakan agar ekspektasi masyarakat lebih stabil. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif dan data time series agar dapat mengukur secara lebih akurat hubungan antara kebijakan moneter dan inflasi serta memperluas variabel eksternal yang memengaruhi dinamika inflasi di Indonesia secara berkelanjutan.

Referensi

1. Anggraini, S. L., Aliyah, F., Sofyan, M. A., & Astuti, R. P. (2025). Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Mengendalikan Inflasi Dan Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 243–245. <https://doi.org/10.59435/Menuis.V1i5.260>
2. Azky, S., Anita, R., & Oktaviani, N. R. (2024). Peranan Kebijakan Moneter Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 32–37. <https://doi.org/10.56184/Jeijournal.V2i1.326>
3. Firmansyah, M., & Mu'ammal, I. (2023). Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Kredit Dan Harga Aset Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Bank Sentral Di Asean-5. *Jurnal Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi*, 4(2), 378–396. <https://doi.org/10.37631/Ebisma.V4i2.1206>
4. Lesmana, I., Ginting, I. D. Br, Simbolon, L. L., & Simanjuntak, N. (2025). Kebijakan Moneter : Menjaga Keseimbangan Antara Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(2), 119–126. <https://doi.org/10.30640/Trending.V3i2.3994>
5. Mujiadi, I., Asyhari, A. A., & Ghondur, A. (2025). Peran Kebijakan Moneter Dalam Mengendalikan Inflasi : Studi Kepustakaan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 181–191. <https://doi.org/10.61132/Moneter.V3i1.1120>
6. Ningsih, L., & Tanjung, I. I. (2025). Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Mengendalikan Inflasi Di Indonesia Dengan Pendekatan Error Correction Model (Ecm). *Journal Of Business And Economics Research*, 6(2), 493–500. <https://doi.org/10.47065/Jbe.V6i2.7301>
7. Patty, J. R. (2026). Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Journal Of Innovative And Creativitycreativity*, 6(1), 1127–1135. <https://doi.org/10.31004/Joecy.V6i1.6827>
8. Riofita, H. (2022). Developing Digital Empowerment Programs To Enhance The Marketing Performance Of Private Islamic Higher Education Institutions. *Muslim Business And Economic Review*, 1(2), 257–280. <https://doi.org/10.56529/Mber.V1i2.70>
9. Riofita, H. (2024a). Perceived Opportunity And Risk Control Role On Willingness To Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(2), 137–151. <https://doi.org/10.52813/Je.V13i2.353>
10. Riofita, H. (2024b). Strengthening The Competitive Image Of Private Islamic Higher Educational Institutions In Indonesia As An

- Effective Marketing Material : The Mediating Role Of Service Innovation. *Journal Of Sti Policy And Management*, 9(2), 73–85. <https://dx.doi.org/10.14203/Stipm.2024.404>
11. Riska, E., Siregar, E. H., & Anthony, B. H. (2025). Peran Kebijakan Moneter Menurunkan Tingkat Inflasi Di Indonesia. *Jurnal Riset Dan Penalaran Mahasiswa*, 2(2), 67–74. <https://journal.student.uny.ac.id/rpm/article/download/23824/19550>
 12. Salim, A., Fadilla, F., & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17–28. <https://doi.org/10.36908/Esha.V7i1.268>
 13. Sari, M. D. A. P., Moehadi, & Anggapratama, R. (2023). Analisis Faktor Penentu Pengendalian Inflasi Berdasarkan Kebijakan Moneter Kuantitatif Di Indonesia Tahun 2012-2021. *Jurnal Abwatzikhoebillah*, 9(2), 409–416. <https://doi.org/10.37567/Alwatzikhoebillah.V9i2.1792>
 14. Sitorus, H. N. S., Samora, R., Azzhara, F., & Sitorus, F. S. (2024). Peran Kebijakan Moneter Dalam Mengendalikan Inflasi Di Indonesia. *Journal Of Management Accounting Tax And Production*, 2(1), 44–47. <https://doi.org/10.57235/Mantap.V2i1.1519>
 15. Syahrul, M., Azziz, A., Cholis, M. N., & Astuti, R. P. (2025). Peran Bank Indonesia Dalam Mengendalikan Inflasi Melalui Kebijakan Moneter. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 8(2), 231–236. <https://doi.org/10.59435/Menulis.V1i5.258>
 16. Zega, Y. A., Leona, M., Putra, S., Angelina, N., Phang, S., & Loo, E. (2022). Analisa Kebijakan Pemerintah Terkait Ancaman Pengangguran Pasca Kenaikan Inflasi. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1121–1127. <https://doi.org/10.58344/Jmi.V1i4.108>